

**DAYA JANGKAU SISWA KE SMP NEGERI 1 PADANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR**

M. Zainudin

SMP Negeri 1 Padangan
Jl. Diponegoro 117 Padangan Bojonegoro

***Abstract:** In the region of Bojonegoro regency, the educational facilities related to the Junior Secondary School service level are not distributed evenly so that many Primary School graduates are not accommodated in Junior Secondary Schools. To improve the access and even distribution of the Junior Secondary Schools' services affordable to all of the population needs to be done through formal education. The objective of this research is to study the coverage of services of State Junior Secondary School 1 of Padangan as a middle educational facility in rural area. This research is expected to answer the question "How is the coverage of services of State Junior Secondary School 1 of Padangan as a middle educational facility in rural area?" This research used the descriptive qualitative method. Its data included primary and secondary data. The results of the research are as follows: the coverage of services of State Junior Secondary School 1 of Padangan as the educational facility in Bojonegoro regency has reached the region of Padangan sub-district and beyond the sub-district. The result of the nearest neighbor analysis shows that the value of the nearest neighbor (T) of Primary Schools is 0.50 meaning that the spread of Primary Schools in Padangan sub-district tends to be clustered because the index of the nearest neighbor (T) is less than 1. Similarly, the spread of Primary Schools in Padangan sub-district tends to be clustered because the index of the nearest neighbor (T) is 0.48. Based on the results of the research, recommendations are proposed as follows: 1) the educational facilities in Padangan sub-district particularly for the level of Junior Secondary Schools need to be improved by adding the number of classes so as to accommodate the exceeding number of Primary School graduates. 2) educational alternatives and new school units in Padangan sub-district should be established as to fulfill the community's need. 3) The improvement of quality and facilities of Junior Secondary Schools as a whole is an alternative for the spread of the coverage of school services.*

Keywords: Coverage of Junior Secondary school, Padangan Bojonegoro

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan non formal, pendidikan formal maupun pendidikan informal. Hal tersebut memberi kesempatan bagi seluruh rakyat

Indonesia untuk memperoleh pendidikan dengan baik. Di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 8 kota, serta 2 kota administratif, partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dirasakan dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan.

Angka partisipasi murni tingkat SD/MI sebesar 97,81 persen, SMP/MTs sebesar 85,94 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 53,37 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat SD/MI sebesar 113,82 persen, tingkat SMP/MTs sebesar 103,55 persen dan tingkat SMA/MA/SMK adalah 73,30 persen. Namun demikian sebaran lembaga pendidikan dalam membeikan layanan pendidikan di provinsi Jawa Timur perlu mendapatkan perhatian.

Dasar kebijakan pendidikan nasional terkait dengan sebaran dan daya jangkauan pelayanan sekolah dapat di telusuri dari amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Visi Departemen Pendidikan Nasional adalah “Terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Misi Departemen Pendidikan Nasional terkait dengan daya jangkauan pelayanan sekolah dapat dimaknai dari uraian berikut ini.

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

- 3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- 4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- 5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Kecamatan Padangan sebagai bagian dari Kabupaten Bojonegoro bagian terdiri dari 26 SD dan 3 MI, 2 SMP Negeri, 1 MTs Negeri, 2 MTs swasta, 2 SMA/MA Negeri dan 3 SMA/MA/SMK swasta. Pendidikan di Kecamatan Padangan belum dapat berkembang dengan pesat. Masih banyak anak usia sekolah yang melanjutkan sekolahnya ke Kecamatan Cepu.

Salah satu lembaga pendidikan yang juga ikut merasakan adalah SMP Negeri 1 Padangan yang hanya berjarak 2,5 km dari Kecamatan Cepu. Sebagai sekolah yang cukup lama di Kecamatan Padangan, SMP Negeri 1 Padangan tidak kesulitan mendapatkan murid, bahkan pagu yang disediakan tidak mencukupi. Akan tetapi anak-anak yang yang berprestasi di Kecamatan Padangan masih banyak yang memilih sekolah di Kecamatan Cepu dari pada di SMP Negeri 1 Padangan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu dikaji bagaimana daya jangkauan pelayanan SMP Negeri 1 Padangan sebagai fasilitas pendidikan menengah di Kecamatan Padangan. Standar nasional jangkauan sekolah lanjutan yang harus ditempuh oleh penduduk menuju lokasi sekolah dengan perjalanan kaki dalam keadaan normal adalah 5 km setara 1 jam jalan kaki. Tujuan dari kajian ini adalah mengetahui daya jangkau siswa ke SMP Negeri 1 Padangan Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan fokus sentral di SMP Negeri 1 Padangan. Penelitian didasarkan pada observasi terhadap variabel lokasi sebaran sekolah, aksesibilitas, topografi, keterjangkauan, kondisi jalan, dan konektivitas. Data tersebut di analisis secara deskriptif, yaitu untuk memberikan penjelasan kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Arikunto, 2000 : 53).

Lokasi sebaran sekolah dipetakan posisinya. Selanjutnya dianalisis pola keruangannya dengan analisis tetangga terdekat berdasarkan pusat perkotaan desa atau kecamatan. Selanjutnya juga dilakukan analisis diskriptif dengan perbandingan dengan teori yang merupakan bentuk teknik analisis yang secara induktif (Sugiyono: 24).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daya jangkauan pelayanan SMP Negeri 1 Padangan berdasarkan asal SD dan radiusnya disajikan pada Tabel 1. Jangkauan pelayanan SMP Negeri 1 Padangan berdasarkan asal SD dan jarak tempuh dapat dilihat berikut ini.

- a. Dari asal sekolah yaitu jumlah SD/MI yang ada di Kecamatan Padangan 28 sekolah dan 5 dari Kecamatan lain.
- b. Dari jarak tempuh yang terjauh 15 km dan yang terdekat sejauh 0,2 km.

Jangkauan Pelayanan sekolah SMP Negeri 1 Padangan berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat dari radius / jarak tempuh sekolah asal menuju ke sekolah tujuan sebagai berikut ini.

- a. Berjarak kurang dari 1 km ada 2 SD yaitu SDN Padangan 1, SDN Padangan 2 dan SDN Padangan 4.
- b. Berjarak 1-2 km ada 4 SD, yaitu SDN Padangan 3, SDN Dengok 2, SDN Kuncen 2 dan MI Irsyadus Suban
- c. Berjarak 2-3 km ada 2 SD yaitu SDN Banjarejo 1 dan SDN Banjarejo 2.
- d. Berjarak 3-4 ada 5 SD ada 5 SD yaitu SDN Banjarejo 3, SDN Nguken, SDN Cendono, SDN Kebonagung, SDN Ngasinan, MI Al Fatah dan dari Kecamatan Cepu.
- e. Berjarak 4-5 ada 4 SD yaitu SDN Sonorejo berjarak 4,3 km, SDN Sonorejo 2 berjarak 4,9 km, SDN Ngradin 1 berjarak 4,1 km, SDN Kendung berjarak 4,9 km.

- f. Berjarak sekitar 5 km yaitu SDN Sidorejo 1 sejauh 5,5 km, SDN Sidorejo 2 sejauh 5,1 km dan SDN Ngradin 2 sejauh 5 km.
- g. Berjarak 6-7 km yaitu SDN Purworejo 1 sejauh 6,8 km, SDN Purworejo 2 sejauh 6 km, SDN Ngeper 1 sejauh 6,3 km dan SDN Ngeper 2 sejauh 7 km.
- h. Dari luar Kecamatan Padangan yaitu Kecamatan Purwosari berjarak 4,3 km, Kecamatan Ngraho berjarak 15 km, Kecamatan Batokan berjarak 7 km, Kecamatan Kalitidu berjarak 6 km dan Kecamatan Cepu berjarak 3,6 km.

Tabel 1. Jangkauan Pelayanan SMP Negeri 1 Padangan berdasarkan Asal SD dan Radius (km²)

No.	Asal SD dan Kecamatan	Radius Jangkauan (km ²)	No.	Asal SD dan Kecamatan	Radius Jangkauan (km ²)
1	SDN Padangan 1	0,2	18	SDN Ngeper 1	6,3
2	SDN Padangan 1	0,6	19	SDN Ngeper 2	7
3	SDN Padangan 1	1,2	20	SDN Cendono	3,7
4	SDN Padangan 1	0,6	21	SDN Ngasinan	3,5
5	SDN Kebonagung	3,8	22	SDN Sonorejo 1	4,3
6	SDN Banjarejo 1	2,3	23	SDN Sonorejo 2	5
7	SDN Banjarejo 2	2,3	24	SDN Ngradin 1	4,1
8	SDN Banjarejo 3	3,1	25	SDN Ngradin 1	5
9	SDN Kuncen 2	1,2	26	SDN Kendung	4,9
10	SDN Dengok 2	1,3	27	MI Irsyadus Syuban	1
11	SDN Nguken	3,8	28	MI Al Fattah	3
12	SDN Sidorejo 1	5,5	29	Kecamatan Purwosari	4,3
13	SDN Sidorejo 2	5,1	30	Kecamatan Ngraho	15
14	SDN Purworejo 1	6,8	31	Kecamatan Kasiman	7
15	SDN Purworejo 2	6	32	Kecamatan Kalitidu	6
16	SDN Prangi	7,7	33	Kecamatan Tambakrejo	16
17	SDN Tebon	8,6	34	Kecamatan Cepu	3,6

Berdasarkan pada observasi lapangan, dapat dipaparkan hal-hal berikut ini.

- a. Tinggi rendahnya tingkat aksesibilitas dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu dijangkau dari daerah lainnya (Bintarto, 1982:91). Karena SMP Negeri 1 Padangan berada di pusat kota Kecamatan Padangan maka

system jaringan yang tersedia dapat dikatakan banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat aksesibilitasnya mudah.

b. Topografi

Tinggi rendahnya wilayah sangat tergantung pada morfologi, topografi, dan laut juga sistem jaringan serta tersedia, sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar berbagai hubungan antara daerah sekitarnya (Sumaatmadja, 1988:44-45). Berdasarkan topografi yang ada maka tidak menjadi penghalang bagi kelancaran untuk terjadinya interaksi dan

aktivitas manusia sehingga dapat dikatakan tingkat aksesibilitasnya cukup tinggi.

- c. Tinggi rendahnya derajat keterjangkauan dipengaruhi oleh panjang jalan dan jumlah penduduk yang ada. Panjang jalan yang ada pada Kecamatan Padang adalah 74 km dan jumlah penduduk Kecamatan Padang pada tahun 2009 adalah 45.833 jiwa. Sehingga dapat dihitung aksesibilitasnya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}} = \frac{74}{45.833} = 0,002$$

Tabel 2 menyajikan panjang jalan menurut jenis permukaannya.

- d. Beberapa unsur yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas, misalnya kondisi jalan, jenis alat angkutan yang tersedia, frekuensi keberangkatan dan jarak (Robinson Tarigan, 2003:140). Berdasarkan pengamatan peneliti maka kondisi jalan cukup baik (beraspal dan paving), angkutan umum tercukupi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian tingkat aksesibilitasnya adalah tinggi.
- e. Konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain adalah adanya berbagai jaringan antara daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena lokasi penelitian berada pada pusat kota kecamatan maka konektivitas dengan daerah lain cukup

baik. Sehingga dapat dikatakan tingkat aksesibilitasnya cukup baik.

Persebaran SD di Kecamatan Padang dapat dihitung dengan menggunakan analisis tetangga terdekat sebagai berikut ini.

Hasil analisis :

- a. Jumlah titik deliniasi adalah 28 yang diasumsikan sebagai $\sum N$.
- b. Jarak rata-rata yang diukur antar tetangga terdekat (ju).

Diketahui :

Jumlah jarak masing-masing titik adalah 22,8 cm, sehingga :

$$\begin{aligned} \sum j &= 22,8 \text{ cm} \times 75.000 \\ &= 1.710.000 \text{ cm} \\ &= 17,10 \text{ km} \end{aligned}$$

Dengan demikian :

$$ju = \frac{\sum j}{\sum N} = \frac{17,10}{28} = 0,611 \text{ km}$$

- c. Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik memiliki pola random

Diketahui :

Luas daerah yang diteliti adalah :

$$\begin{aligned} &= 17,3 \text{ cm} \times 13,1 \text{ cm} \times 75.000 \text{ cm} \\ &= 16.997.250 \text{ cm}^2 \\ &= 169,9725 \text{ km}^2 \end{aligned}$$

$$p = \frac{\sum N}{Z}$$

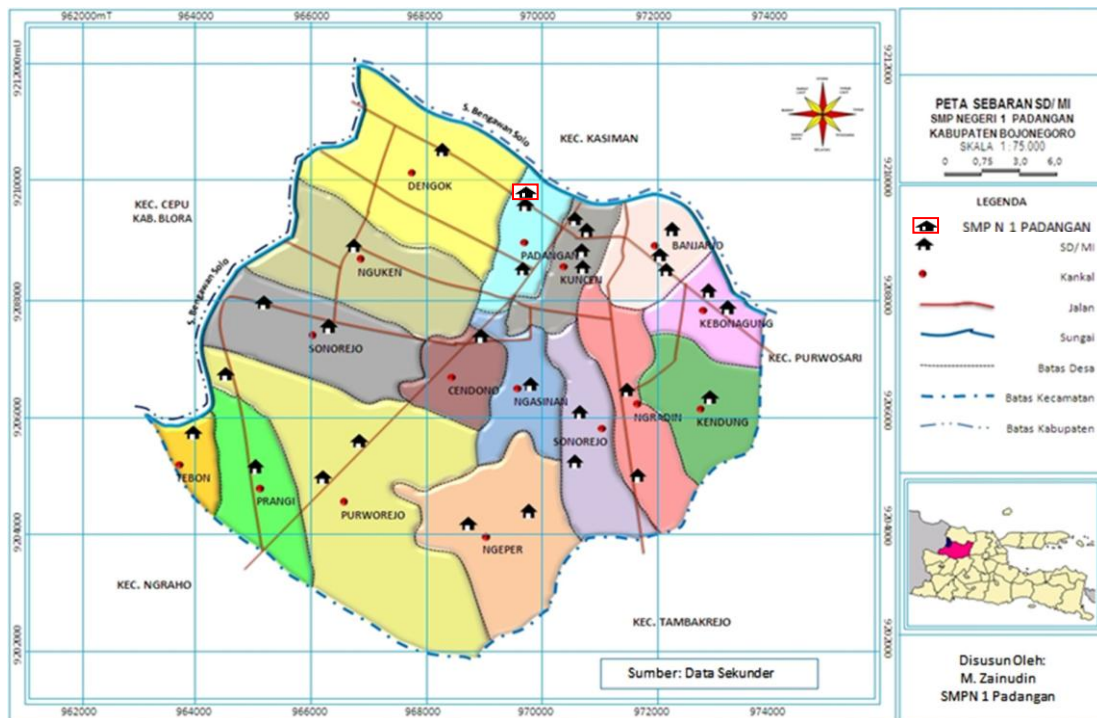
$$\begin{aligned} p &= \frac{28}{69,97} \\ &= 0,165. \end{aligned}$$

$$\text{Sehingga } j_h = \frac{1}{2 \sqrt{0,165}} = 1,231$$

Jadi indeks penyebaran terdekat adalah :

$$T = \frac{J_u}{J_h} = \frac{0,611}{1,231} = 0,50$$

Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa persebaran SD di Kecamatan Padangan mempunyai pola mengelompok (*cluster*). Gambar 1 menyajikan persebaran SD/MI Kecamatan Padangan.



Gambar 1. Peta Persebaran SD/MI Kecamatan Padangan

Untuk persebaran SMP di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut ini.

Hasil analisis :

- a. Jumlah titik deliniasi adalah 4 yang diasumsikan sebagai $\sum N$.
- b. Jarak rata-rata yang diukur antar tetangga terdekat (j_u).

Diketahui :

Jumlah jarak masing-masing titik adalah 8,4 cm, sehingga :

$$\begin{aligned} \sum j &= 8,4 \text{ cm} \times 75.000 \\ &= 630.000 \text{ cm} \\ &= 6,3 \text{ km} \end{aligned}$$

Dengan demikian

$$j_u = \frac{\sum j}{\sum N} = \frac{6,3}{4} = 1,575 \text{ km}$$

- c. Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik memiliki pola random. Luas daerah yang diteliti adalah :

$$\begin{aligned}
 &= 17,3 \text{ cm} \times 13,1 \text{ cm} \times 75.000 \text{ cm} \\
 &= 16.997.250 \text{ cm}^2 \\
 &= 169,9725 \text{ km}^2
 \end{aligned}$$

$$p = \frac{\sum N}{Z}$$

$$\begin{aligned}
 p &= \frac{4}{169,97} \\
 &= 0,024
 \end{aligned}$$

$$\text{Sehingga } j_h = \frac{1}{2 \sqrt{0,024}} = 3,236$$

Jadi indeks penyebaran terdekat adalah :

$$T = \frac{J_u}{J_h} = \frac{1,575}{3,236} = 0,48$$

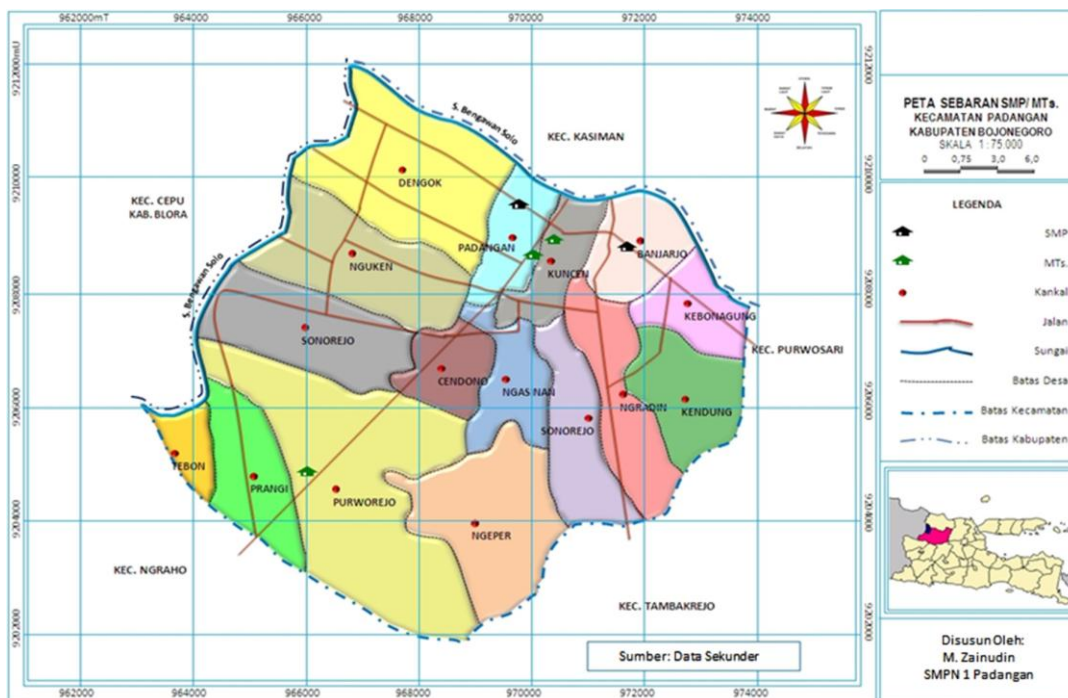
Berdasarkan hasil perhitungan indeks tetangga terdekat (T) maka dapat diketahui bahwa daerah yang dianalisis yaitu persebaran SLTP di Kecamatan Padangan mempunyai pola mengelompok (*cluster*). Gambar 2 menyajikan persebaran SMP Kecamatan Padangan.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks tetangga terdekat (T) maka dapat diketahui bahwa persebaran SD di Kecamatan Padangan mempunyai pola mengelompok (*cluster*). Pola mengelompok tersebut terlihat

pada peta berada di pusat-pusat kegiatan, yaitu di ibu kota desa atau ibu kota kecamatan. Sementara untuk persebaran SLTP di Kecamatan Padangan lebih terlihat terpusat pada wilayah ibu kota kecamatan dari pada pola persebaran SD walaupun indeks tetangga terdekatnya sama-sama kurang dari 1. Hal ini dikarenakan secara umum penempatan SLTP di setiap kecamatan berada pada sekitar ibu kota kecamatan, dalam hal ini berada di Desa Padangan Kecamatan Padangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan dalam penentuan lokasi SMP adalah keterjangkauan dari desa sekitar, transportasi yang mudah, jumlah penduduk usia sekolah yang cukup dan kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah. Hal ini dikarenakan, ibu kota desa ataupun ibu kota kecamatan merupakan pusat kegiatan barang dan jasa, seperti pelayanan kesehatan, pemerintahan, kegiatan perekonomian dan kegiatan pendidikan.

Keadaan aksesibilitas yang tinggi/baik pada lokasi penelitian yaitu berdasarkan sistem jaringan yang tersedia, topografi daerah Padangan, kondisi jalan, jenis alat angkutan, konektivitas dan jarak masing-masing SD ke SMP Negeri 1 Padangan maka memberikan dorongan bagi siswa SD di Kecamatan Padangan untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Padangan.



Gambar 2. Peta Persebaran SMP Kecamatan Padangan

Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, (1979) mengatakan bahwa pola permukiman dan agihan permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Agihan permukiman membicarakan hal dimana terdapat permukiman, dan dimana tidak terdapat dalam suatu wilayah, atau dengan pernyataan lain agihan permukiman membicarakan tentang lokasi permukiman. Pola permukiman membicarakan sifat agihan permukiman, atau susunan agihan permukiman. Apabila dikaitkan dengan fasilitas pendidikan maka luas jangkauan pelayanan pendidikan minimal sangat tergantung pada tingkat kepadatan penduduk pada wilayah. Makin tinggi kepadatan penduduk makin kecil wilayah jangkauan pelayanan pendidikan begitu juga sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jangkauan pelayanan SMP Negeri 1 Padangan berdasarkan asal SD dan radius/ jarak tempuh menuju lokasi sekolah sudah bisa menjangkau wilayah di Kecamatan Padangan bahkan sampai ke luar Kecamatan Padangan. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya jaringan jalan yang baik dan transportasi menuju ke SMP Negeri 1 Padangan yang mudah dan lancar. Faktor pendukung lainnya adalah kondisi topografi yang datar, konektivitas antar daerah yang baik dan system jaringan yang memadai. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat aksesibilitasnya tinggi.

2. Persebaran SD dan SMP di Kecamatan Padangan memiliki pola mengelompok. Hal ini didukung oleh topografi Kecamatan Padangan yang datar.

Saran

1. Jangkauan SMP Negeri 1 Padangan yang baik akan memberikan kontribusi terhadap lulusan SD dari daerah manapun untuk berkompetisi menjadi siswa SMP Negeri 1 Padangan. Hal ini akan memberikan dampak yang besar bagi SLTP lain dalam mencari siswa, lebih-lebih jika daya tampung SMP Negeri 1 Padangan terus diperbesar.
2. Perlu penambahan ruang kelas baru pada SMP Negeri 1 Padangan untuk menampung lulusan SD di Kecamatan Padangan.
3. Perlunya peningkatan kualitas dan fasilitas seperti SMP Negeri 1 Padangan baik di dalam maupun di luar Kecamatan Padangan sehingga domonasi persebaran SLTP tidak mengelompok dan prosentase daya tampung yang berasal dari luar Kecamatan Padangan dapat diperkecil.

Dahroni, 1997. Geografi Permukiman. *Diktat Kuliah*. Surakarta: Fakultas Geografi UMS.

Husaeni Usman. 2006. *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nursid Sumaatmadja. 1982. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Tarsito.

Robinson Tarigan. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Singarimbun, M. 1982. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Udin Syaefudin Sa'ud., Abin Syamsuddin Makmun. 2006. *Perencanaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Otonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2009. *Kecamatan Padangan Dalam Angka Tahun 2009*.Bojonegoro : BPS.
- Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3S.